

---

# Analisis Hukum atas Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia

## DAYAT PRAYOGA

---

### Abstrak

Perlindungan varietas tanaman merupakan aspek krusial dalam mendukung ketahanan pangan, inovasi pertanian, serta hak kekayaan intelektual para pemulia tanaman. Di Indonesia, perlindungan terhadap varietas tanaman diatur melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT), yang memberikan hak eksklusif kepada pemulia atas varietas baru yang dihasilkannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, mekanisme perlindungan, serta tantangan implementasi perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU PVT telah memberikan kerangka hukum yang memadai, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan, seperti kurangnya kesadaran pemulia akan hak-hak hukumnya, terbatasnya akses terhadap prosedur pendaftaran, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak PVT. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku sektor pertanian, serta harmonisasi regulasi nasional dengan ketentuan internasional. Perlindungan yang efektif terhadap varietas tanaman tidak hanya berdampak pada kepastian hukum bagi pemulia, tetapi juga mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

***Kata Kunci:*** *perlindungan varietas tanaman, hak kekayaan intelektual, hukum pertanian, UU PVT, pemulia tanaman*

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sumber daya genetik tanaman yang sangat kaya dan beragam. Keanekaragaman hayati tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat domestikasi tanaman tropis yang penting di dunia. Dalam konteks pembangunan pertanian nasional, pemanfaatan sumber daya genetik ini memainkan peranan vital dalam menghasilkan varietas tanaman unggul yang adaptif, produktif, dan tahan terhadap berbagai tantangan lingkungan serta perubahan iklim. Inovasi dalam pemuliaan tanaman menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan nasional.

Namun, di balik peran strategis pemuliaan tanaman, terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil inovasi tersebut. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang secara khusus ditujukan bagi pemulia tanaman yang berhasil menciptakan varietas baru. Dengan adanya perlindungan ini, pemulia memiliki hak eksklusif atas penggunaan varietas tersebut untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional.

Di Indonesia, perlindungan terhadap varietas tanaman secara legal pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengadopsi sistem perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), serta sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional seperti Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dalam kerangka WTO.

Meskipun keberadaan UU PVT telah memberikan kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya pelaksanaan dan efektivitas perlindungan varietas tanaman di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, tingkat kesadaran para pemulia—baik individu, lembaga riset, maupun perguruan tinggi—terhadap pentingnya pendaftaran varietas masih tergolong rendah. Banyak varietas unggul yang telah dilepas ke publik tanpa melalui proses perlindungan hukum yang memadai, sehingga membuka peluang terjadinya eksploitasi tanpa kompensasi terhadap pemulia aslinya.

Kedua, prosedur administratif dan teknis dalam proses pendaftaran varietas sering kali dianggap kompleks dan memakan waktu, khususnya bagi pemulia dari kalangan petani atau lembaga kecil. Ketiga, perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya efektif dalam mengantisipasi pelanggaran seperti penggunaan tanpa izin, penggandaan ilegal, atau klaim sepihak atas varietas oleh pihak lain, terutama ketika menyangkut varietas lokal dan tanaman tradisional.

Di samping itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah perlunya harmonisasi antara kebijakan PVT dengan sistem perlindungan tradisional berbasis komunitas adat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, banyak varietas tanaman yang berasal dari pengetahuan kolektif masyarakat adat atau petani lokal yang telah dikembangkan secara turun-temurun. Sistem PVT yang berbasis pada pemulia individual sering kali tidak mampu mengakomodasi kompleksitas hak kolektif atas varietas lokal ini, sehingga menimbulkan potensi konflik antara sistem hukum modern dan kearifan lokal.

Dari sudut pandang hukum, perlindungan varietas tanaman tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan hukum nasional yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, penting untuk menelaah sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam UU PVT dan peraturan pelaksanaannya telah menjawab kebutuhan perlindungan bagi para pemulia serta kontribusinya terhadap sistem pertanian nasional. Selain itu, analisis hukum yang mendalam juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dan kelembagaan yang menghambat perlindungan hak atas varietas tanaman secara optimal.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum terhadap perlindungan varietas tanaman di Indonesia, dengan menyoroti dasar hukum yang berlaku, pelaksanaan mekanisme perlindungan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pendekatan normatif dan studi doktrinal, pembahasan dalam artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum nasional di bidang kekayaan intelektual pertanian, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pemulia tanaman di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **1. Landasan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman di Indonesia secara formal diatur melalui **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT)**. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum utama yang memberikan hak eksklusif kepada pemulia atas varietas yang dihasilkannya apabila memenuhi kriteria kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (novelty, distinctness, uniformity, stability – NDUS). Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 tahun bagi tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan, sejak tanggal penerbitan sertifikat.

UU PVT dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana, termasuk **Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2004** tentang Nama Ilmiah dan Umum, serta **Peraturan Menteri Pertanian** terkait prosedur pendaftaran dan pengujian varietas. Di samping itu, keberadaan **Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian**

**(PPVTPP)** berfungsi sebagai lembaga pelaksana yang mengelola permohonan, pengujian, dan penerbitan hak PVT.

Secara normatif, UU PVT telah selaras dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional, khususnya UPOV 1978, meskipun Indonesia belum menjadi anggota resmi UPOV. Selain itu, Indonesia juga terikat pada ketentuan TRIPS yang mensyaratkan negara anggota WTO untuk menyediakan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman melalui sistem paten, sistem *sui generis*, atau kombinasi keduanya. UU PVT dapat dikategorikan sebagai sistem *sui generis* yang mengatur secara khusus perlindungan terhadap varietas tanaman di luar sistem paten umum.

## 2. Prosedur dan Mekanisme Perlindungan

Untuk memperoleh hak perlindungan varietas, pemohon harus mengajukan permohonan kepada PPVTPP dengan menyertakan dokumen administratif dan deskripsi varietas yang memadai. Selanjutnya, varietas akan diuji melalui **pengujian DUS** (Distinctness, Uniformity, Stability) untuk memastikan varietas tersebut benar-benar baru dan memenuhi persyaratan hukum. Setelah dinyatakan lulus uji DUS, sertifikat hak PVT akan diterbitkan.

Dalam praktiknya, proses ini kerap memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang relatif tinggi, terutama dalam tahap pengujian DUS. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi petani atau pemulia dari kalangan kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya dan informasi. Oleh karena itu, sistem perlindungan ini cenderung lebih banyak dimanfaatkan oleh lembaga penelitian besar, universitas, atau perusahaan agribisnis.

Selain perlindungan terhadap varietas baru, UU PVT juga mengenal **perlindungan sementara** yang diberikan selama proses pengujian berlangsung, serta **hak pemanfaatan** yang memungkinkan pemegang hak PVT memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memproduksi atau memperdagangkan varietas tersebut. Namun, penerapan mekanisme ini masih terbatas dan belum optimal dari sisi pengawasan dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran.

## 3. Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun sistem hukum perlindungan varietas tanaman telah tersedia, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental:

**a. Rendahnya Partisipasi Pemulia Lokal**  
Banyak petani dan pemulia lokal yang belum menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap varietas tanaman yang mereka kembangkan. Pengetahuan yang terbatas mengenai prosedur pendaftaran serta manfaat hukum dan ekonomi dari hak PVT membuat partisipasi mereka dalam sistem perlindungan ini masih rendah.

Akibatnya, varietas lokal seringkali tidak tercatat secara resmi dan rentan diklaim atau dimanfaatkan secara komersial tanpa izin.

**b. Dualisme Kepentingan antara Hak Individu dan Komunal**

Salah satu isu kompleks dalam konteks perlindungan varietas di Indonesia adalah konflik antara pendekatan individualistik dalam UU PVT dengan kenyataan sosial budaya bahwa banyak varietas tanaman merupakan hasil kolektif komunitas adat atau petani lokal. Sistem PVT belum sepenuhnya mengakomodasi bentuk perlindungan kolektif atau berbasis komunitas, sebagaimana dimandatkan dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi Nagoya** yang menekankan perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

**c. Lemahnya Penegakan Hukum**

Dalam hal terjadi pelanggaran hak PVT, proses penegakan hukum masih menghadapi hambatan, baik dari sisi substansi hukum maupun kapasitas kelembagaan. Ketidaktegangan dalam pemberian sanksi, kurangnya kapasitas lembaga penegak hukum untuk menangani kasus kekayaan intelektual, serta lemahnya mekanisme pengawasan lapangan menyebabkan banyak pelanggaran tidak tertangani secara tuntas. Perlindungan hukum menjadi tidak efektif bila tidak disertai dengan sistem penegakan yang memadai.

**d. Ketidaksesuaian Regulasi Sektoral**

Sering kali ditemukan tumpang tindih dan ketidaksinkronan antara regulasi perlindungan varietas dengan kebijakan sektoral lainnya, seperti kebijakan pelepasan varietas, perizinan edar benih, serta konservasi sumber daya genetik. Ketidakharmonisan ini menghambat efektivitas sistem perlindungan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha di sektor pertanian.

#### **4. Upaya Reformasi dan Harmonisasi Kebijakan**

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, sejumlah langkah reformasi kebijakan perlu dipertimbangkan untuk memperkuat sistem perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan **peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknis** dari PPVTPP, baik dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur laboratorium, maupun sistem digitalisasi proses pendaftaran.

Kedua, **penguatan literasi hukum** dan sosialisasi kepada pemulia, petani, dan lembaga riset menjadi langkah strategis agar masyarakat mengetahui pentingnya pendaftaran varietas dan memperoleh manfaat hukum serta ekonomi dari hak yang diberikan.

Ketiga, sistem PVT perlu diintegrasikan dengan pendekatan **perlindungan berbasis komunitas** melalui pengakuan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal yang dikembangkan secara kolektif. Hal ini dapat dilakukan melalui penerbitan

**sertifikat hak kolektif** atau mekanisme **benefit-sharing** sebagaimana diatur dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya.

Keempat, harmonisasi antar regulasi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang kohesif dan ramah bagi pemulia. Koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga perlindungan kekayaan intelektual lainnya menjadi kunci untuk menyederhanakan regulasi dan mendorong sinergi kebijakan.

Terakhir, **pembaruan legislasi** atau amandemen terhadap UU PVT dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menyesuaikan kerangka hukum nasional dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial masyarakat, serta tuntutan global di bidang pertanian berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Perlindungan varietas tanaman memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi pertanian, melindungi hasil pemuliaan, serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan pemulia di sektor pertanian. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, telah membentuk kerangka hukum *sui generis* yang memberikan hak eksklusif kepada pemulia atas varietas yang dihasilkannya. Regulasi ini pada dasarnya telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan kekayaan intelektual yang diakui secara internasional, termasuk ketentuan dalam perjanjian TRIPS dan kesesuaian parsial dengan standar UPOV.

Namun, efektivitas perlindungan varietas tanaman di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan substantif. Rendahnya tingkat partisipasi pemulia lokal, kompleksitas prosedur pendaftaran, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakharmonisan antara sistem hukum modern dan hak kolektif masyarakat adat menjadi hambatan utama dalam implementasi UU PVT. Selain itu, belum optimalnya integrasi kebijakan antar sektor terkait juga turut berkontribusi terhadap tidak maksimalnya pemanfaatan sistem perlindungan ini.

Dalam konteks tersebut, penguatan kelembagaan, pembaruan regulasi, dan penyederhanaan prosedur menjadi langkah mendesak untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas perlindungan hukum atas varietas tanaman. Penting pula untuk membangun kesadaran hukum di kalangan petani, pemulia, dan pelaku usaha melalui program literasi dan pendampingan hukum. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif terhadap varietas lokal dan pengetahuan tradisional dengan memberikan pengakuan hukum terhadap hak kolektif masyarakat adat dan sistem perlindungan berbasis komunitas.

Dengan demikian, pengembangan sistem perlindungan varietas tanaman yang kuat, adil, dan responsif tidak hanya menjadi bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual,

tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkeadilan sosial di Indonesia. Pembentukan hukum dan kebijakan di bidang ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sektor pertanian nasional dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, R. S. (2005). Pengaruh Penyuluhan Pertanian Terhadap Produktivitas dan Pendapatan Petani Padi Sawah.
- Siregar, T. H., & Pane, E. (2014). Penerapan T-NATT Terhadap Petugas Pertanian untuk Diklat Agribisnis Tanaman Padi pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (UPT PP SDMP) Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
- Pane, E. (2006). Uji Dosis Pupuk NPK Mutiara dengan Berbagai Waktu Pemberian Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) di Pembibitan Utama.
- Rahman, A., & Harahap, G. (2005). Kebijakan Pengembangan Agribisnis Kopi Robusta dan Kopi Arabica di Indonesia.
- Saleh, K., & Lubis, M. M. (2010). Analisis Hubungan Keberhasilan Kelompok tani dengan Pengetahuan Agribisnis dan Peran Penyuluh Pertanian Studi Kasus: Petani Padi Sawah pada Kelompok Tani Gele Lungi di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- Noer, Z., & Aziz, R. (2023). Eksplorasi dan Identifikasi Patogen, Kejadian Penyakit dan Intensitas Penyakit Bercak Daun pada Pembibitan Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq) di Kabupaten Simalungun.
- Lubis, Y. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Karyawan Kebun Kelapa Sawit PT Langkat Nusantara Kepong (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hasibuan, S., & Simanullang, E. S. (2015). Analisis Usaha Budidaya Ayam Potong Di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kusmanto, H., Mardiana, S., Noer, Z., Tantawi, A. R., Pane, E., Astuti, R., ... & Junus, I. (2014). Pedoman KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di Universitas Medan Area.
- Saragih, M., & Noor, Z. (1998). Evaluasi Kerapatan Populasi Hama Tikus Sebelum dan Sesudah Pengendalian dengan Metode Capture-Recapture di Perkebunan Kelapa Sawit.
- Fritz, W., & Aziz, R. (2003). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Karet (*Hevea Brasilliensis* Muel Arg)(Studi Kasus: Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kab Deli Serdang).
- Siregar, M. A. (2017). Analisis Pengaruh Perubahan Kebiasaan Makan Terhadap Kontinuitas Produksi Telur Itik di Kabupaten Batu Bara (Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Medan Deras) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, R. S. (2006). Pengaruh Sikap dan Faktor Sosial Ekonomi Petani Program Penangkaran Benih Terhadap Pendapatan Petani.
- Siregar, M. E., Matondang, A., Kusmanto, H., Mardiana, S., Noor, Z., Ramdan, D., ... & Kuswardhani, R. (2011). Pedoman Kode Etik Dosen Universitas Medan Area.
- Rahman, A., & Pane, E. (2000). Pengaruh Jarak Tanam Beberapa Jenis Tanaman Mangrove Terhadap Pertumbuhan Vegetatif di Lokasi Tanah Timbul Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
- Siregar, M. A. (2017). Analisis Pengaruh Peluang Investasi, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Saragih, M., & Rahman, A. (2001). Kajian Sebaran dan Tingkat Parasitasi Hemipterus *Varicornis* Terhadap *Lirionya* sp Pada Berbagai Tanaman Inang.
- Nobriama, R. A. (2019). pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (*Theobroma cacao* L.) Di polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sianipar, G. (2019). Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lubis, Y., & Lubis, M. M. (2014). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Tahu Putih di Pasar Kampung Lalang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal.

- Noer, Z., & Aziz, R. (2023). Eksplorasi dan Identifikasi Patogen, Kejadian Penyakit dan Intensitas Penyakit Bercak Daun pada Pembibitan Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq) di Kabupaten Simalungun.
- Kuswardani, R. A., & Lubis, A. A. (2009). Laporan Kegiatan LP3M Tahun 2007 s/d 2009. Universitas Medan Area.
- Panggabean, E. (2001). Kalsium, Magnesium dan Peranannya Pada Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman.
- Panggabean, E. (2004). Diktat Dasar Dasra Teknologi Benih.
- Kuswardani, R. A., & Penggabean, E. L. (2012). Kajian Agronomis Tanaman Sayuran secara Hidroponik Sistem NFT (Nutrient Film Technique) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Panggabean, E. L., & Aziz, R. (2020). Pengaruh Pemberian Pupuk Kompos Jerami Padi dan Pupuk Cair Kulit Kopi Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kacang Panjang (*Vigna Sinensis* L.) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Mardiana, S. (2020). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
- Indrawati, A. (2014). Berita Kegiatan UMA Periode Juni & Juli 2014.
- Kusmanto, H., & Lubis, Y. (2019). Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan (di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai).
- Panggabean, E. L., & Aziz, R. (2020). Pengaruh Pemberian Pupuk Kompos Jerami Padi dan Pupuk Cair Kulit Kopi Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kacang Panjang (*Vigna Sinensis* L.) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Haniza, A. S., & Banjarnahor, M. (2003). Perancangan Heat Exchanger dengan Type Shell-Tube untuk Meningkatkan Efektivitas Waktu Pemanasan di PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Belawan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lubis, Y., & Sakti, I. (2024). Pengaruh Penerapan Penilaian E-Kinerja, Kompetensi Kompetensi, Worklife Balance Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Panggabean, E. L., Simanullang, E. S., & Siregar, R. S. (2013). Analisis Model Produksi Padi, Ketersediaan Beras, Akses dan Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani Padi di Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan.
- Tantawi, A. R. (2019). Manfaat Puasa Untuk Kesehatan Rohani dan Jasmani.
- Manalu, E. M. B. (2017). Analisis Pemasaran Kopi Arabika (*Coffea arabica*) Studikusus: Desa Sitingo II, Kecamatan Sitingo, Kabupaten Dairi.
- Hutapea, S., & Panggabean, E. (2004). Pemanfaatan Potensi Perempuan Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Medan Area.
- Rahman, A., & Pane, E. (2000). Pengaruh Jarak Tanam Beberapa Jenis Tanaman Mangrove Terhadap Pertumbuhan Vegetatif di Lokasi Tanah Timbul Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
- Lubis, Z., & Siregar, T. H. (2022). Analisis Pengaruh Karakteristik Petani Terhadap Efektifitas Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Padi Sawah di Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lubis, K. K. (2017). Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang dan Perusahaan Daerah Pasar (Studi di Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, E. B. M., & Rahman, A. (2010). Analisis Strategi Pengembangan Hutan Rakyat dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Kabupaten Deli Serdang.
- Harahap, Z., & Banjarnahor, M. (2000). Model Tarif Interkoneksi Antar Operator Telekomunikasi (Studi Kasus PT. Telkom Divre I Sumatera) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, M. E., Matondang, A., Kusmanto, H., Mardiana, S., Noor, Z., Ramdan, D., ... & Kuswardhani, R. (2011). Pedoman Kode Etik Dosen Universitas Medan Area.
- Banjarnahor, M. (2017). Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja.
- Rahman, A., & Pane, E. (2007). Profil Agribisnis Tanaman Hias di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- Hutapea, S. (2002). Kesiapan Perempuan di Parlemen.
- Lubis, Y., & Safitri, S. A. (2023). Pengaruh Tingkat Lama Bekerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Perkebunan Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara IV (Studi Kasus Kebun Adolina PT Perkebunan Nusantara IV Kecamatan Pantai Cermin dan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai).

- Lubis, S. N., & Lubis, M. M. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran CPO Sumatera Utara.
- Indrawati, A. (2016). Berita Kegiatan UMA Periode Desember 2016.
- Indrawati, A., & Pane, E. (2017). Respon Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kailan (*Brassica oleraceae* var. *Achepala*) Terhadap Pemberian Pupuk Kompos Kulit Jengkol dan Pupuk Organik Cair Urin Sapi.
- Rahman, A., & Harahap, G. (2005). Kebijakan Pengembangan Agribisnis Kopi Robusta dan Kopi Arabica di Indonesia.
- Tantawi, A. R. (2018). Hikmah yang Terkandung Dalam Waktu Shalat.
- Indrawati, A. (2019). Pemanfaatan Serbuk Cangkang Telur Ayam Dan Pupuk Kascing Di Tanah Ultisol Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Terung Ungu (*Solanum Melongena* L.) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, M. A., & Ilvira, R. F. (2021). Pengaruh Luas Lahan, Investasi Jalan Tol, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Produksi Padi di Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 1990-2019 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Pane, E. (2008). Pengaruh Waktu Kastrasi Bunga Jantan pada Beberapa Varietas Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Jagung (*Zea mays* L) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Saragih, M. (2004). Uji Varietas dan Sumber Inokulum *Rhizobium* sp Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai (*Glycine max* L Merrill) di Polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Indrawati, A., & Pane, E. (2017). Respon Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kailan (*Brassica oleraceae* var. *Achepala*) Terhadap Pemberian Pupuk Kompos Kulit Jengkol dan Pupuk Organik Cair Urin Sapi.
- Lubis, Y. (2001). Pengendalian Gulma di Perkebunan Karet.
- Siregar, A. (2021). Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen Sistem Pengukuran Kinerja Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pekerjaan Umum Medan Sunggal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lubis, Z., & Hasibuan, S. (2020). Analisis Komparasi Kinerja dan Variabel Lingkungan antara Penggunaan Pupuk Organik dan Anorganik di PT Eastern Sumatra Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Pane, E., Siregar, T., & Rahman, A. (2016). Kelangkaan Penyadap di Perkebunan Karet.